

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAHMAD DIAN AFRYANSYAH
NIM. 12030111150041

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI DI INTERNET OLEH PEMERINTAH DAERAH



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

RAHMAD DIAN AFRYANSYAH
NIM. 12030111150041

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Rahmad Dian Afryansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150041

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
INFORMASI AKUNTANSI DI INTERNET
OLEH PEMERINTAH DAERAH**

Dosen Pembimbing : Dr. Haryanto, SE, MSi, Akt.

Semarang, 11 Februari 2013

Dosen Pembimbing

Dr. Haryanto, SE, MSi, Akt.
NIP. 197412222000121001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Rahmad Dian Afryansyah

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111150041

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN
INFORMASI AKUNTANSI DI
INTERNET OLEH PEMERINTAH
DAERAH**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Maret 2013

1. Dr. H. Haryanto, SE, M.Si., Akt (.....)
2. Daljono, SE, M.Si., Akt (.....)
3. Dr. H. Agus Purwanto, M. Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Rahmad Dian Afryansyah, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet oleh Pemerintah Daerah, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang,
Yang membuat pernyataan,

Rahmad Dian A.
12030111150041

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Keberhasilan tidak ada di alam mimpi

Tidak juga dalam alam rencana

Keberhasilan ada di alam tindakan

(Mario Teguh)

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

Keluargaku, semoga dapat membuat kalian bangga

Almamaterku, semoga dapat menjadi literatur yang bermanfaat

ABSTRACT

The aim of this research is to examine factors which predicted the level of accounting information disclosure in internet by local government. Factors which are going to be tested are size, investment level, wealth, political competition and press visibility.

The population of this research are local governments of Indonesia. The number of samples is 47, calculated using Slovin calculation formula. Analysis method used to test hypothesis in this research is linear regression.

The result of this study indicates that press visibility significantly has negative influence to the level of accounting information disclosure in internet by local government. It means that the local government resistance to provide accounting information to the media because the media's tendency is usually to explore the negative side of a local government such as the budget deficit and corruption. The other factors, such like size, investment level, wealth, and political competition do not influence the level of accounting information disclosure in internet by local government significantly.

Key words : the level of accounting information disclosure, local government, political competition, size, investment level, wealth, press visibility

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang diprediksi mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintah daerah, kompetisi politik, dan *press visibility*.

Populasi dari penelitian ini adalah pemerintahan daerah Indonesia. Jumlah sampel sebanyak 47 diperoleh berdasarkan formula perhitungan Slovin. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah regresi linear.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *press visibility* secara signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan terdapat keengganan dari pejabat pemerintah daerah untuk memberikan informasi akuntansinya kepada media karena kecenderungan media yang lebih banyak memberitakan sisi negatif suatu pemerintah daerah seperti defisit anggaran dan korupsi. Sedangkan faktor-faktor lainnya, yaitu ukuran, tingkat investasi, kekayaan pemerintahan daerah dan kompetisi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah.

Kata kunci : tingkat pengungkapan informasi akuntansi di internet, pemerintah daerah, kompetisi politik, ukuran, kekayaan, tingkat investasi, *press visibility*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN INFORMASI AKUNTANSI OLEH PEMERINTAH DAERAH”**.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Bapak Dr. Haryanto, SE, MSi, Akt. selaku dosen pembimbing atas setiap bimbingan, petunjuk, dan waktu yang telah diluangkan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
3. Ibu Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt. selaku dosen wali atas bimbingan dan saran yang telah diberikan selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Segenap dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro untuk ilmu bermanfaat yang telah diajarkan.
5. Seluruh staf tata usaha dan perpustakaan Universitas Diponegoro atas segala bantuan selama penulis menempuh kuliah.

6. Keluarga yang sangat penulis kasihi serta segenap keluarga lainnya atas dukungan yang senantiasa diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Rekan-rekan tugas belajar (Fauzi, Koming, Kumara, Amin, Asep, Amdi, Eka, Ari, Yuda, Erfan, Putu, Yuli, Indra, Ade) atas doa, perhatian, dukungan, inspirasi, dan kebersamaan yang sangat membantu penulis untuk berjuang dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Pihak-pihak lain yang telah membantu penyelesaian skripsi.

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi lingkungan pemerintahan daerah Indonesia serta penelitian selanjutnya sekalipun penulis juga menyadari bahwa penelitian ini hanyalah titik kecil dari luasnya literatur dan ilmu pengetahuan di bidang sektor publik. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna perbaikan penelitian ini.

Semarang, 11 Februari 2013

Penulis,

Rahmad Dian Afryansyah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	7
2.1.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1.1 Pemerintahan Daerah di Indonesia.....	7

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	8
2.1.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.....	9
2.1.1.4 Teori Agency.....	12
2.1.1.5 Manfaat Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet.....	13
2.1.2 Penelitian Terdahulu.....	13
2.2 Kerangka Pemikiran.....	15
2.3 Hipotesis	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
3.1 Variable Penelitian dan Definisi Operasional.....	22
3.2 Populasi dan Sampel.....	26
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	27
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.5 Metode Analisis.....	27
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	
4.1 Gambaran Obyek Penelitian.....	29
4.2 Analisis Data.....	30
4.2.1 Statistik Deskriptif.....	30
4.2.1 Uji Asumsi Klasik.....	35
4.2.1.1 Uji Multikolonieritas.....	35
4.2.1.2 Uji Autokorelasi.....	37
4.2.1.3 Uji Heteroskedastisitas.....	38
4.2.1.4 Uji Normalitas.....	39

4.2.1.5 Uji Linearitas.....	42
4.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	42
4.2.3 Uji Goodness of Fit.....	44
4.2.3.1 Koefisien determinasi.....	44
4.2.3.2 Uji Statistik F.....	44
4.2.3.3 Uji Statistik t.....	45
4.3 Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	55
5.2 Keterbatasan.....	57
5.3 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	14
Tabel 3.1 Indeks <i>scoring</i>	23
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	31
Tabel 4.2 Uji Multikolonieritas	35
Tabel 4.3 Nilai Tolerance dan VIF.....	36
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi.....	37
Tabel 4.5 Uji Glejser.....	39
Tabel 4.6 Uji Kolmogorov-Smirnov.....	41
Tabel 4.7 Hasil pengukuran regresi.....	42
Tabel 4.8 Uji statistik F.....	44
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis.....	54

DAFTAR GAMBAR/GRAFIK

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian.....	16
Gambar 4.1 Grafik Scatterplot	38
Gambar 4.2 Grafik Histogram.....	40
Gambar 4.3 Grafik Normal Plot.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A : Tabulasi Data.....	56
Lampiran B : Tabulasi Data Indeks Tingkat Pengungkapan Informasi Akuntansi.....	59
Lampiran C : Hasil Output SPSS.....	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada era informasi seperti saat ini, penggunaan media *internet* untuk menyampaikan informasi berkembang pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah pengguna *internet* di tengah masyarakat. Saat ini, *internet* sudah menjadi kebutuhan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Seiring dengan hal ini, banyak perusahaan yang sudah menggunakan *internet* sebagai media dalam menyampaikan informasi akuntansinya. Akan tetapi, hal ini sepertinya belum menjadi perhatian pihak pemerintah di Indonesia. Pada saat ini, *website* dari sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia justru kurang begitu diperhatikan, khususnya dari sisi pengungkapan informasi akuntansi. Di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah memang hanyalah sebatas menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansi pemerintahan. Untuk pelaporan keuangan kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela. Akan tetapi, dengan keluarnya Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan, bertanggung jawab dan lebih berorientasi kepada pelayanan masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah daerah melaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi.

Suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel semestinya mampu

menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat. Komunikasi yang efektif berupa informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi sektor publik adalah penting bagian dari sistem itu sendiri. Dalam proses komunikasi, ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan aksesibilitas sangat penting. Oleh karena itu, komunikasi dan teknologi informasi memiliki peran penting sehingga dapat mewujudkan prinsip transparansi sebagai indikator adanya kelola keuangan yang baik.

Salah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh pemerintah daerah ialah dengan mengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di *internet* sehingga seluruh *stakeholder* memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan. Pengungkapan sukarela laporan keuangan di *internet* dinilai efisien dan efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi suatu pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya kepada masyarakat.

Penelitian yang menguji faktor-faktor yang menentukan tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa penelitian, seperti penelitian Laswad, dkk (2005),

menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel yang menentukan pengungkapan sukarela di sektor publik. Hasil penelitian Laswad, dkk (2005) menunjukkan bahwa *leverage*, kekayaan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela, sementara tipe pemerintahan district councils memiliki hubungan negatif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela. Sedangkan hasil penelitian Ana Garcia (2010) menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian Laswad, dimana hasilnya menunjukkan hasil bahwa *press visibility* memiliki hubungan yang negatif dengan pelaporan keuangan di *internet* secara sukarela. Dari hasil pengamatan, kedua penelitian ini juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih menambah referensi atas faktor-faktor yang menentukan tingkat pelaporan akuntansi secara sukarela oleh pemerintah daerah, khususnya di Indonesia yang memang belum banyak diteliti. Dalam penelitian ini, karakteristik yang akan diuji ialah jumlah penduduk, kompetisi politik, kekayaan daerah, tingkat investasi, dan *press visibility*.

Jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada daerah tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan *internet* untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya adalah melalui *internet*.

Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek-proyek publik yang membutuhkan investasi, karena mereka menganggap bahwa proyek ini

nantinya akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk mengharapkan bahwa para pembuat kebijakan yang terlibat dalam proyek dengan investasi yang bernilai besar akan sangat tertarik untuk menyebarkan informasi ini seluas mungkin. Pengungkapan informasi pada *website* dapat membantu untuk menyoroti manfaat dari investasi dengan efisien.

Kekayaan daerah berbanding lurus dengan tingkat kepedulian masyarakat kepada kinerja pemerintah daerahnya. Semakin besar kekayaan suatu daerah, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk menilai bagaimana kekayaan tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat familiar dengan *internet* seperti sekarang ini, maka pengungkapan informasi akuntansi melalui *internet* dipandang cukup penting.

Setelah terpilih, biasanya pejabat publik akan mengabaikan janji-janji politiknya. Akan tetapi, saingan politik yang kuat akan selalu memantau kinerjanya dan mencari-cari kelemahannya. Untuk menjaga peluang terpilih kembali, maka pejabat publik yang sedang berkuasa akan berusaha memenuhi janji-janji politiknya. Untuk menginformasikan kepada masyarakat akan pemenuhan janjinya ini, penggunaan *internet* sebagai media informasi dipandang cukup efektif.

Kebanyakan media lebih memilih untuk mengeksploitasi sisi negatif sebuah pemerintahan. Korupsi, skandal, dan defisit anggaran dianggap lebih menarik untuk diberitakan kepada masyarakat. Akan tetapi, hal ini seharusnya justru memotivasi pemerintah daerah untuk meng-counter media dengan mengungkapkan informasi akuntansinya, termasuk melalui *internet* untuk

memberikan gambaran tentang sisi positif pemerintah daerah.

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti mengambil usulan judul penelitian “**faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di *internet* oleh pemerintah daerah**”.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah jumlah penduduk suatu pemerintah daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah?
2. Apakah tingkat investasi mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah?
3. Apakah kompetisi politik mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah?
4. Apakah kekayaan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah?
5. Apakah *press visibility* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh positif dari jumlah penduduk, tingkat investasi, kekayaan daerah, kompetisi politik, serta *press visibility* terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan bagi :

1. Pihak pemerintah daerah, yaitu pemerintah daerah dan perangkatnya. Diharapkan dapat lebih memotivasi pihak pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela.
2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah, khususnya masyarakat, dalam hal menilai akuntabilitas dan transparansi keuangan negara.
3. Peneliti lain, sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penentu tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.
4. Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan tempat peneliti bekerja, untuk melihat gambaran atas tingkat keberhasilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam menjalankan fungsi sebagai guru bagi instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntansi keuangan negara yang akuntabel, transparan, tepat waktu dan akurat.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah provinsi terbagi atas daerah kota dan daerah kabupaten. Setiap daerah provinsi, daerah kota, dan daerah kabupaten mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Tiap pemerintahan daerah dipimpin oleh kepala daerah. Sebutan kepala daerah untuk pemerintahan provinsi, pemerintahan kota, dan pemerintahan kabupaten, masing-masing ialah gubernur, walikota, dan bupati. Dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 14, kepala daerah berperan sebagai badan eksekutif, artinya kepala daerah menyusun dan menyampaikan anggaran untuk mendapatkan persetujuan, kemudian melaksanakannya sesuai ketentuan perundang-undangan setelah mendapatkan persetujuan. Ditegaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung kepala daerah (pilkada). Prosedur dan mekanisme pemilihan kepala daerah sekarang ini, yakni semenjak UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, lebih menggambarkan pelaksanaan demokrasi. Pilkada dilaksanakan secara langsung, terbuka kemungkinan bagi calon independen/nonparpol untuk maju melalui partai politik (parpol)/gabungan parpol, dan proses penyaringan bakal calon dilaksanakan secara terbuka dengan mewajibkan tiap parpol/gabungan parpol mengumunkan proses dan hasil penyaringan kepada masyarakat.

2.1.1.2 Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah

Laporan keuangan daerah merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi

anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Informasi tersebut dapat diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana operasional keuangan pemerintahan daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dinyatakan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap pemerintahan daerah mempunyai kewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Rincian teknis penyajian LKPD diatur dalam Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dari semua peraturan yang dinyatakan diatas, tidak ada yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mengungkapkan laporan keuangannya melalui media informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, pemerintah daerah dapat saja mengungkapkan informasi akuntansinya kepada masyarakat melalui media seperti *internet* sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan transparansi kepada publik.

2.1.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD)

Sesuai Pernyataan Nomor 1 Standar Akuntansi Pemerintahan tentang penyajian laporan keuangan, laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Pengguna yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, termasuk lembaga legislatif, pemeriksa/pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a) indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran
- b) indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:

- a) Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realsasinya dalam satu periode pelaporan.

- b) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

- c) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

d) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas.

2.1.1.4 Teori Agency

Teori Hendriksen dan Breda (1991) menjelaskan bahwa teori agensi (*agency theory*) adalah hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam hal ini selaku *agent* adalah pemerintah daerah, sedangkan *principal* adalah masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Masyarakat selaku *agent* dalam hal ini memberikan amanat kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaannya kepada masyarakat.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, terkadang informasi yang diterima oleh masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksamaan informasi ini menimbulkan asimetri informasi yang mendorong perilaku oportunistik dan konflik kepentingan. Para pejabat pemerintah daerah akan berusaha memaksimalkan kepentingan pribadinya tanpa persetujuan masyarakat. Adanya masalah berupa konflik kepentingan dan asimetri informasi ini dapat mengakibatkan sebuah pemerintahan menanggung biaya keagenan yang cukup besar, dalam rangka mengawasi dan memastikan tidak ada hal-hal yang dapat merugikan masyarakat selaku *principal*. Oleh karena itu, untuk menekan biaya keagenan dan meningkatkan hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah,

diperlukan adanya transparansi informasi dari pemerintah daerah yang simetris dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu cara yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini adalah dengan mengungkapkan informasi akuntansinya melalui *internet*. Menurut Bertot, dkk (2010), dengan kemudahan mendapatkan informasi tentang pemerintah, seperti halnya pelaporan keuangan melalui *internet*, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mengurangi korupsi.

2.1.1.5 Manfaat Pengungkapan Informasi Akuntansi di Internet

Suatu cara yang mungkin paling nyaman dan *cost effective* bagi pihak pemerintahan untuk menyebarkan informasi di zaman sekarang adalah menggunakan internet (Styles dan Tennyson, 2007)

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya melalui internet antara lain :

1. Internet menawarkan biaya yang rendah baik bagi pengguna maupun penyedia.
2. Internet dapat diakses dari mana saja tanpa terbatas tempat dan jam kerja.
3. Informasi yang diungkapkan dapat disajikan dalam berbagai bentuk sehingga memudahkan pengguna.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk memeriksa pelaporan keuangan *internet* pada organisasi-organisasi laba, namun hanya ada sedikit penelitian dengan topik yang sama yang dilakukan di institusi pemerintahan (Laswad, dkk

2005 dan Garcia, 2010). Penelitian yang telah dilakukan mengenai pelaporan keuangan pada sektor publik di *internet* antara lain :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti & Tahun Penelitian	Tujuan Penelitian	Desain Penelitian (Variabel & Metodologi Penelitian)	Hasil Penelitian	Saran untuk Penelitian Selanjutnya
Laswad et al., 2005	Memeriksa karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi pengungkapan sukarela laporan keuangan di <i>internet</i>	Variabel Dependen Pelaporan keuangan di <i>internet</i> secara sukarela oleh pemerintah daerah Variabel Independen Kompetisi politik, ukuran, <i>leverage</i> , kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers, tipe <i>council</i> Metodologi Penelitian Statistik deskriptif, analisis univariat, dan analisis regresi	<i>Leverage</i> , kekayaan pemerintahan daerah, visibilitas pers memiliki hubungan positif dengan praktik IFR. Tipe council berhubungan negatif dengan praktik IFR. 2. Hubungan positif antara praktik IFR dengan kompetisi politik dan ukuran, tidak didukung.	Mengembangkan indeks pengungkapan di <i>internet</i> , tidak sebatas seperti yang diungkapkan dalam <i>hard copy</i> laporan keuangan.
Garcia (2010)	Meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi	Variabel dependen Reporting Index	<i>Size</i> , <i>Leverage</i> , <i>Capital Investment</i> ,	Ketiadaan database tentang management dan figur financial

	pelaporan informasi akuntansi secara <i>online</i> oleh pemerintah daerah	Variabel Independen <i>Size, Leverage, Capital Investment, Political Competition, dan Press Visibility</i> Metodologi Penelitian Statistik deskriptif, Analisis regresi, dan Regresi Logistik	<i>Political Competition</i> berpengaruh positif, sedangkan <i>Press Visibility</i> berpengaruh negatif	dari pemerintah daerah.
--	---	--	---	-------------------------

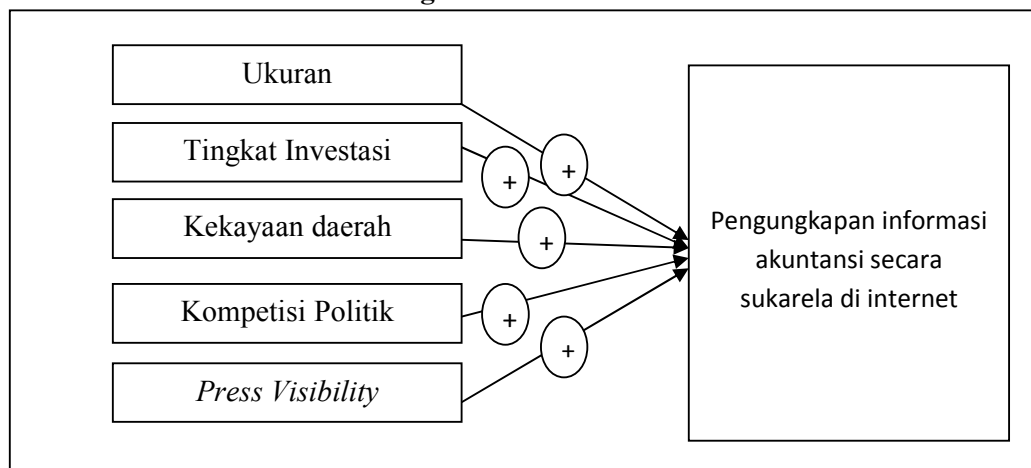
2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaporan keuangan melalui *internet* adalah salah satu cara untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder* (khususnya masyarakat) dengan biaya yang murah. Namun demikian, tidak semua pemerintah daerah yang secara sukarela memilih untuk mengambil manfaat dari *internet* sebagai media dalam melakukan pelaporan keuangan. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di *internet* diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti dan mencoba untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendasari perbedaan yang ditemukan di dalam website, yaitu: faktor apa yang mempengaruhi pemerintah daerah secara sukarela melaporkan informasi keuangan pada situs web, dan, di antara mereka yang melakukan, apa

yang menyebabkan beberapa dari mereka untuk mengungkapkan informasi lebih dari yang lain? Beberapa studi telah melihat pertanyaan yang sama untuk sektor swasta perusahaan, biasanya berfokus pada insentif manajerial dalam kegiatan sektor misalnya Bradbury, 1992; Cerf, 1961; Cooke, 1991; Debrecey et al, 2002.; Firth, 1979; Giner, 1997; Malone et al., 1993 (dikutip oleh Garcia, 2010). Penelitian-penelitian ini memiliki perspektif teori keagenan, dan telah mengidentifikasi beberapa variabel yang menjelaskan kecenderungan untuk secara sukarela melaporkan informasi keuangan, seperti ukuran, kinerja sektor kegiatan, atau leverage (Garcia, 2010). Dipandang perlu adanya pengujian atas teori ini untuk mengetahui apakah hal ini dapat juga dilakukan pada sektor pemerintah khususnya pemerintah daerah di Indonesia.

Dari uraian di atas, kerangka pemikiran mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah dapat digambarkan dalam suatu model berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penelitian



2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Menurut Garcia (2010), ukuran suatu organisasi telah sering dianggap determinan variabel di belakang praktek akuntansi dan pelaporan keuangan. Organisasi besar akan menunjukkan asimetri informasi yang lebih besar antara manajer dan *stakeholders*. Sebagai konsekuensinya, biaya agen yang lebih besar akan timbul dari asimetri tersebut. Menurut Chow & Wong-Boren (1987), dalam upaya untuk mengendalikan biaya keagenan, organisasi besar akan lebih bersedia untuk mengungkapkan informasi daripada perusahaan kecil (dikutip oleh Garcia, 2010). Oleh karena itu, organisasi yang lebih besar diharapkan untuk menggunakan berbagai macam strategi pelaporan, termasuk pelaporan secara *online* melalui situs *web* mereka (Debreceeny et al., 2002;). Dalam penelitian ini, ukuran suatu organisasi pemerintahan daerah dilihat dari jumlah penduduknya.

Di Indonesia, jumlah penduduk suatu pemerintah daerah cenderung berbanding lurus dengan tingkat kemajuan teknologi dan informasi pada suatu daerah. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan jumlah penduduk yang besar cenderung lebih modern dan banyak mengandalkan *internet* untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi tentang kinerja pemerintah daerahnya. Oleh karena itu, cara yang efektif bagi pemerintah daerah dalam mengungkapkan informasi akuntansinya adalah melalui *internet*. Kota besar juga mendapatkan keuntungan atas pelaporan keuangan melalui *website* jika melihat kenyataan bahwa kota besar memiliki lebih banyak staf ahli yang bisa mengembangkan lingkungan situs

web dengan baik dan secara berkesinambungan terus menjaga informasi yang harus diperbaharui.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Jumlah penduduk suatu pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh tingkat investasi terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Biasanya, *leverage* entitas sektor publik dapat dibenarkan jika digunakan untuk kebutuhan melakukan investasi yang membantu peningkatan kesejahteraan warga (Garcia, 2010). Banyak penduduk memiliki sikap positif terhadap proyek-proyek publik yang membutuhkan investasi, karena mereka memahami bahwa proyek ini akan meningkatkan kondisi hidup mereka. Dengan melihat anggaran setiap kota pada tahun pemilihan sudah cukup untuk menunjukkan bahwa politisi memiliki kepentingan dalam memulai investasi proyeknya yang ambisius dengan harapan dapat menangkap pemilih sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, tampaknya masuk akal untuk mengharapkan bahwa para pembuat kebijakan yang terlibat dalam proyek dengan investasi yang signifikan akan sangat tertarik dalam menyebarkan informasi ini seluas mungkin. Pelaporan keuangan pada website dapat membantu untuk menyoroti manfaat dari investasi dengan efisien.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Tingkat investasi berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh kekayaan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Suatu entitas yang memiliki kekayaan besar akan meningkatkan kompetisi atas suatu jabatan public (Laswad, dkk 2005). Hal ini akan mendorong pemerintah daerah yang saat ini berkuasa untuk menunjukkan kepada masyarakat tentang pemenuhan janji-janji politiknya dahulu, dengan memberikan informasi tentang kinerjanya kepada masyarakat. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah pengungkapan informasi akuntansi melalui *internet*.

Besarnya kekayaan daerah juga berbanding lurus dengan kepedulian masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah. Kota dengan tingkat kekayaan yang lebih tinggi akan memiliki tingkat pemantauan politik dan informasi yang lebih tinggi atas gambaran tentang kinerja pemerintah daerah (Tennyson 2007). Seiring dengan masyarakat yang sudah sangat mengenal *internet* saat ini, kecenderungan memanfaatkan *internet* sebagai media untuk mendapatkan informasi tentang kinerja pemerintah daerah juga meningkat.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Kompetisi Politik terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Setelah terpilih, politisi biasanya mengabaikan janji-janji pemilu yang dibuatnya dulu tanpa hukuman langsung. Namun, perilaku oportunistik

ini mungkin akan berkurang jika ada oposisi yang kuat untuk memantau kelompok yang ada di pemerintah. Rival politik dalam hal ini akan meminta untuk menginformasikan opini publik apapun terkait dengan penyimpangan dalam tindakan pemerintah dari janji-janji pemilu dibuat. Oleh karena itu, pihak oposisi ini berfungsi untuk menahan deviasi kepentingan antara pemilih dan politikus (Zimmerman, 1977). Akibatnya, pembuat kebijakan mungkin memiliki kepentingan dalam menjaga janji dibuat untuk pemilih jika mereka ingin dipilih kembali. Tentu saja, dengan tingginya faktor ini maka semakin besar tingkat persaingan politik (Baber, 1983 dalam Laswad,dkk 2005). Strategi komunikasi juga memainkan peran di sini. Jika kelompok yang mengatur ingin memenuhi komitmennya, tentunya akan tertarik menggunakan semua media pelaporan untuk mengkomunikasikan hal ini kepada warga (Baber & Sen, 1984 dalam Laswad,dkk 2005). Website mungkin menjadi salah satu alat yang paling efektif untuk pelaporan informasi (Laswad dkk, 2005).

H4 : Kompetisi Politik berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

2.3.5 Pengaruh *press visibility* terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Media memainkan peran sebagai moderator dalam hubungan keagenan antara pemilih dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, hubungan ini mungkin memiliki pengaruh pada tingkat pelaporan informasi keuangan. Di satu sisi, pengungkapan informasi akuntansi dapat melayani tuntutan informasi dari media.

Di sisi lain, pengungkapan informasi akuntansi mungkin berfungsi sebagai mekanisme pertahanan yang digunakan oleh politisi untuk mengontrol data yang akan diterbitkan pers (Ingram, 1984). Dengan demikian, pemerintah daerah yang memiliki tekanan dari media lebih besar akan mengeksplorasi penggunaan beberapa saluran untuk pelaporan, termasuk *internet*, untuk menyebarkan informasi keuangan yang dijabarkan oleh orang-orang mereka sendiri (Laswad et al. 2005). Namun, media tidak selalu bertindak atas nama warga negara, melainkan mereka memiliki tujuan keuangan mereka sendiri. Untuk itu, media biasanya lebih memilih untuk menerbitkan berita yang menyajikan skandal dan korupsi untuk meningkatkan popularitas mereka. Kekhawatiran ini ditunjukkan beberapa waktu lalu oleh Zimmerman (1977): "pemantauan yang disediakan oleh pers tidak memastikan bahwa pejabat terpilih akan beroperasi dalam kepentingan terbaik konstituennya, tetapi hanya bahwa bentuk-bentuk perilaku tertentu akan dipantau lebih dekat daripada yang lain". Dengan memperhitungkan kekhawatiran ini, akan sering terjadi bahwa pers visibilitas pada pemerintah daerah terdiri dari berita yang berhubungan dengan anggaran dengan defisit yang tinggi, kenaikan beban pajak dan kesulitan dalam membayar utang, serta masalah keuangan lainnya. Akan tetapi, dengan faktor tersebut, pemerintah setempat mungkin saja justru akan semakin terdorong untuk melaporkan informasi akuntansinya melalui *website* dengan harapan hal ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa keadaan yang sebenarnya terjadi tidak seperti yang diberitakan.

H5 : *Press visibility* berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Terikat

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Melalui analisis terhadap variabel terikat adalah mungkin untuk menemukan jawaban atas suatu masalah (Sekaran, 2006). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah.

3.1.1.1 Tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah

Tingkat pengungkapan ini adalah tingkat pemberian informasi keuangan oleh pemerintah daerah di *internet*. Variabel ini akan diukur dengan metode *scoring* yang dikembangkan oleh Garcia (2010).

Adapun penilaian indeks *scoring* yang akan dilakukan dapat dilihat pada table 3.1. Setelah score didapatkan, maka akan kita bagi dengan nilai maksimalnya yaitu 16,5. Nantinya *scoring* ini akan memiliki nilai minimal 0 dan nilai maksimal 1.

3.1.2 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif (Sekaran, 2006). Apabila setiap unit kenaikan variabel bebas diikuti oleh kenaikan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi

variabel terikat secara positif. Demikian juga sebaliknya, apabila setiap unit penurunan variabel bebas diikuti oleh penurunan variabel terikat maka variabel bebas mempengaruhi secara negatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk, kekayaan daerah, tingkat investasi, kompetisi politik, dan *press visibility*.

Tabel 3.1
Indeks Scoring

Kategori	Uraian	Scoring
Informasi yang tercantum	Jumlah anggaran	1
	Neraca	1
	LRA	1
	LAK	1
	Opini Audit	1
	Kinerja	1
	Renstra	1
	CaLK	1
	Data Tahun Lalu	0,75
	Segment reporting	0,75
Format	PDF	1
	HTML	0,75
	Flash	0,75
	Excel	0,5
	PPT	0,5
	Word	0,5
Interaksi dengan pengguna	Email	1
	Forum	1
	Mailing list	1

3.1.2.1 Jumlah penduduk

Jumlah penduduk suatu pemerintah daerah mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* secara sukarela oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, variabel jumlah penduduk suatu pemerintah daerah dilihat dari jumlah penduduk yang ada di pemerintah daerah tersebut.

3.1.2.2 Tingkat investasi

Investasi terhadap proyek publik dalam jumlah besar akan menjadi daya tarik tersendiri di tengah masyarakat. Salah satu sarana bagi masyarakat untuk mengetahui tentang investasi proyek publik ini adalah melalui *internet*. Dalam hal ini, variabel tingkat investasi diukur dari nilai investasi pada laporan keuangan pemerintah daerah.

3.1.2.3 Kekayaan Daerah

Suatu daerah yang memiliki kekayaan yang besar akan meningkatkan persaingan atas jabatan publik. Oleh karena itu, pejabat yang sedang berkuasa akan memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerjanya dalam mengelola kekayaan tersebut untuk menjaga peluang terpilih kembali.

Dalam hal ini, kekayaan daerah diukur dari total asset yang dimiliki daerah.

3.1.2.4 Kompetisi politik

Dalam rangka memberitahukan kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah memenuhi janji-janji kampanye, juga untuk memberikan tekanan kepada pihak oposisi agar memperkecil tingkat elektabilitas mereka, pemerintah daerah dapat menggunakan sarana *internet* sebagai media agar dapat terpilih kembali di periode berikutnya. Kompetisi politik ini dapat diukur dengan menggunakan Indeks Herfindahl-Hirschmann yang dikembangkan oleh Herfindahl dan Hirschmann (1982) dengan rumus sebagai berikut :

$$H = \sum_{i=1}^N s_i^2$$

dimana s_i adalah persentase perolehan suara suatu calon kepala daerah pada pemilihan umum dan N adalah jumlah calon kepala daerah.

Setelah indeks HHI diperoleh, maka hasilnya akan dibagi secara *inverse* sebagaimana pengukuran yang dikembangkan oleh Garcia (2010) dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Inverse Kompetisi Politik} = \frac{1}{\text{Indeks HHI}}$$

Hal ini dilakukan dengan anggapan bahwa masing-masing kandidat memiliki peluang yang sama untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, semakin tinggi nilai *inverse* indeks HHI, maka semakin kompetitif situasi politik yang terjadi di suatu daerah tanpa adanya pihak yang dominan. Adapun nilai minimal dari inverse kompetisi politik ini adalah 1 dan maksimal adalah 10.

3.1.2.5 Press Visibility

Sebagian besar media hanya mengungkap sisi negatif dari sebuah pemerintah daerah. Akan tetapi, ada kecenderungan bahwa pemerintah daerah justru akan lebih termotivasi untuk mengungkapkan informasi keuangannya kepada media.

Variabel ini akan diukur dengan jumlah quote pada *google* untuk setiap pemerintah daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, baik dari tingkat propinsi, kabupaten/kota. Jumlah pemerintah daerah di Indonesia ialah sebanyak 34 pemerintahan provinsi, 93 pemerintahan kota, dan 403 pemerintahan kabupaten. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun sampel yang nantinya akan digunakan, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti.

Kriteria tersebut adalah :

1. Pemerintah daerah telah memiliki laporan keuangan yang audited, dan datanya bisa didapatkan di BPK.
2. Pemerintah daerah memiliki *website* resmi.
3. Data hasil pemilihan kepala daerah bisa diperoleh dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum.

Sampling adalah proses pengambilan sebagian elemen dari suatu populasi sebagai wakil dari populasi tersebut. Besaran sampel yang tepat untuk penelitian adalah lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 (Sekaran, 2006).

Penentuan besarnya sampel menggunakan rumus Slovin, yang dikemukakan Yamane (1973) dengan nilai $e^2 = 10\%$, dengan rumus :

$$n = \frac{N}{1 + (N \cdot e^2)}$$

keterangan :

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e^2 = nilai kelonggaran

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, melalui media perantara. Data sekunder tersebut berupa laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2011 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Periode data yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2011.

Data variabel dependen, yaitu tingkat pengungkapan informasi akuntansi di *internet* oleh pemerintah daerah, diperoleh dengan mengamati langsung pada situs resmi pemerintah daerah. Alamat situs resmi pemerintah daerah didapat dari www.depdagri.go.id.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi dokumentasi. Data-data dan teori dalam penelitian ini diperoleh dari literatur, artikel, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan landasan teori. Data juga diperoleh dari studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder baik dari lembaga yang mengeluarkan data tersebut maupun dari *internet*.

3.5 Metode Analisis

3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menghasilkan gambaran dari data yang telah terkumpul. Analisis deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata (mean), maksimum, minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji hipotesis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini ialah *Regression Linear*. Pemilihan *Regression Linear* dilakukan karena penelitian ini memiliki variabel dependen yang bersifat metrik dan variabel independen yang bersifat metrik.

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang tersebut diatas, maka model regresi linear yang akan digunakan adalah :

$$\text{IFR} = \alpha + \beta_1 \text{Jumlah penduduk} + \beta_2 \text{Tingkat Investasi} + \beta_3 \text{Kekayaan Daerah} + \beta_4 \text{Kompetisi Politik} + \beta_5 \text{Press visibility} + \mu_i$$

Dimana :

IFR	= indeks <i>scoring</i> terhadap <i>website</i> pemerintah daerah
α	= Konstanta
Jumlah penduduk	= Jumlah penduduk pemerintah daerah
Tingkat Investasi	= tingkat investasi suatu pemerintah daerah
Kekayaan daerah	= Total asset suatu pemerintah daerah
Kompetisi politik	= indeks kompetisi politik
<i>Press visibility</i>	= <i>Press visibility</i> dari suatu pemerintah daerah
μ	= error